

**ANALISIS SOAL TENTANG “123 MAHASISWA DIKABARKAN POSITIF COVID 19 USAI
IKUT DEMO TOLAK UU CIPTA KERJA”**

Mata Kuliah : Pendidikan Kewarganegaraan

Semester / Kelas : 2 / F

Dosen Pengampu : 1. Roy Kembar Habibi, M. Pd.

2. Drs. Rapani, M. Pd.



DISUSUN OLEH :

Devinta Afrilian (2413053208)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

1. **Bagaimanakah tanggapanmu mengenai isi dari berita tersebut? Hal positif apa yang bisa anda ambil dari kejadian tersebut?**

Jawab :

Menurut tanggapan saya, berita tersebut menunjukkan dampak serius dari unjuk rasa di tengah pandemi Covid-19, yaitu meningkatnya risiko penularan virus. Fakta bahwa 123 mahasiswa dan demonstran dinyatakan positif atau reaktif Covid-19 setelah mengikuti aksi menolak UU Cipta Kerja menjadi pelajaran penting tentang perlunya menjaga kesehatan publik di situasi seperti ini. Hal positif yang dapat saya ambil dari berita tersebut adalah :

- Kesadaran akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan publik, terutama yang melibatkan kerumunan besar.
- Dorongan untuk mencari cara alternatif dalam menyampaikan aspirasi tanpa membahayakan kesehatan masyarakat, seperti melalui diskusi akademis atau media digital.

2. **Bagaimanakah menurut pendapatmu mengenai tata cara mengemukakan pendapat di tempat umum seperti demonstran yang merusak fasilitas umum saat menyampaikan orasinya tetapi merasa tidak bersalah meskipun telah jelas-jelas merusak dan bagaimanakah cara menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi covid-19?**

Jawab :

Menurut saya, demonstran yang merusak fasilitas umum saat demonstrasi tidak hanya melanggar hukum tetapi juga merugikan masyarakat luas. Karena, demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat, tetapi harus dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab. Menurut saya, ada beberapa cara untuk menyalurkan aspirasi yang lebih baik di tengah pandemi Covid-19, diantaranya :

- Diskusi Akademis : Mahasiswa dapat melakukan kajian ilmiah terhadap isu yang diperjuangkan dan menyampaikannya kepada pihak berwenang.

- Media Digital : Memanfaatkan platform media sosial, petisi online, atau webinar untuk menyuarkan pendapat secara luas tanpa risiko penularan.
- Audiensi Formal : Mengajukan audiensi kepada pemerintah atau DPR untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

3. Bagaimanakah solusimu mengenai permasalahan benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh dalam konteks tetap mengedepankan antara hak dan kewajiban yang seimbang?

Jawab :

Benturan kepentingan antara pengusaha dan buruh sering kali terjadi karena perbedaan prioritas, seperti : pengusaha berfokus pada efisiensi dan keuntungan, sementara buruh mengutamakan kesejahteraan. Menurut saya, solusi yang tepat untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak adalah :

- Dialog Tripartit : Melibatkan pemerintah, pengusaha, dan buruh dalam forum diskusi untuk mencari solusi bersama.
- Peraturan yang Adil : Pemerintah perlu memastikan regulasi seperti UU Cipta Kerja memberikan perlindungan bagi buruh sekaligus mendukung iklim investasi.
- Transparansi : Semua pihak harus terbuka dalam mengungkapkan kebutuhan dan kendala masing-masing untuk menghindari konflik.
- Penguatan Serikat Pekerja : Serikat pekerja dapat menjadi wadah buruh untuk menyampaikan aspirasi secara terorganisir.

4. Jelaskan hal yang perlu diperbaiki dalam rangka menjunjung tinggi hak dan kewajiban antara negara dan warga negara sehingga mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara!

Jawab :

Menurut saya, ada beberapa hal yang harus diperbaiki untuk mewujudkan kehidupan harmoni antara negara dan warga negara dalam konsep bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diantaranya :

- Partisipasi Publik : Negara harus membuka ruang dialog yang luas bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam proses pengambilan kebijakan.
- Pendidikan Kewarganegaraan : Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka melalui pendidikan formal maupun informal.
- Penegakan Hukum : Menjamin bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi sehingga hak warga negara terlindungi.
- Transparansi Pemerintah : Pemerintah harus transparan dalam setiap kebijakan sehingga masyarakat memahami alasan di balik keputusan tersebut.
- Protokol Kesehatan : Dalam situasi pandemi, negara harus memastikan bahwa setiap kegiatan publik dilakukan dengan memperhatikan kesehatan masyarakat.